



PROFIL

**Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan**



Sejarah

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) adalah salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sektor perikanan budidaya di Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir dan pedesaan.

DJPB mulai beroperasi setelah pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000, yang bertujuan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan. DJPB didirikan untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya sebagai bagian dari visi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis perikanan yang berkelanjutan.

Seiring waktu, DJPB mempunyai peran penting dalam mengelola berbagai aspek terkait budidaya perikanan, mulai dari pengelolaan benih, pakan dan obat ikan, kesehatan ikan, serta pengembangan prasarana dan sarana budidaya, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya ikan. DJPB juga mendukung penerapan teknologi modern yang ramah lingkungan dalam budidaya perikanan.



Tugas

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

Fungsi

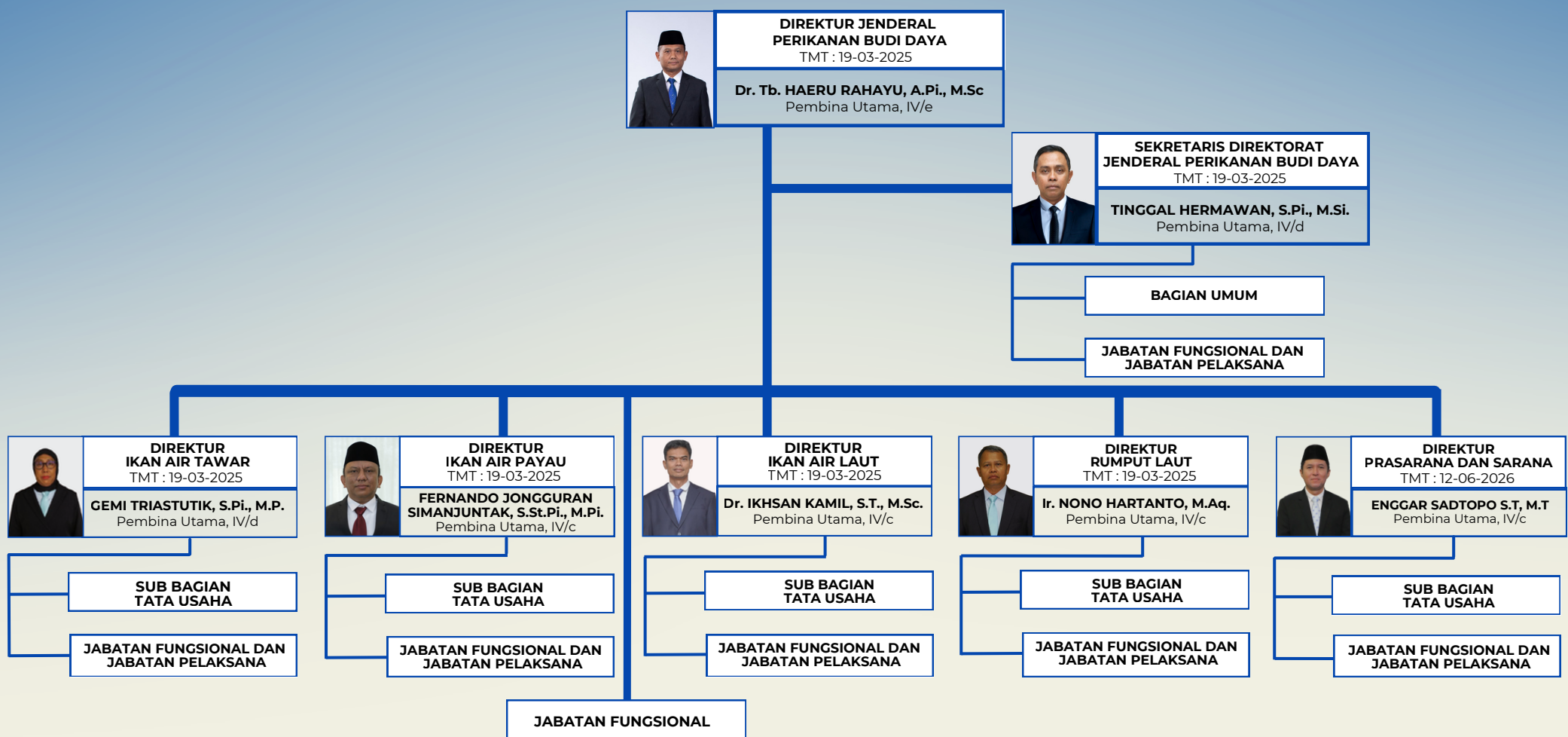
- 1 Perumusan kebijakan
- 2 Pelaksanaan kebijakan
- 3 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- 4 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- 5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
“di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan”.
- 6 Pelaksanaan administrasi; dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

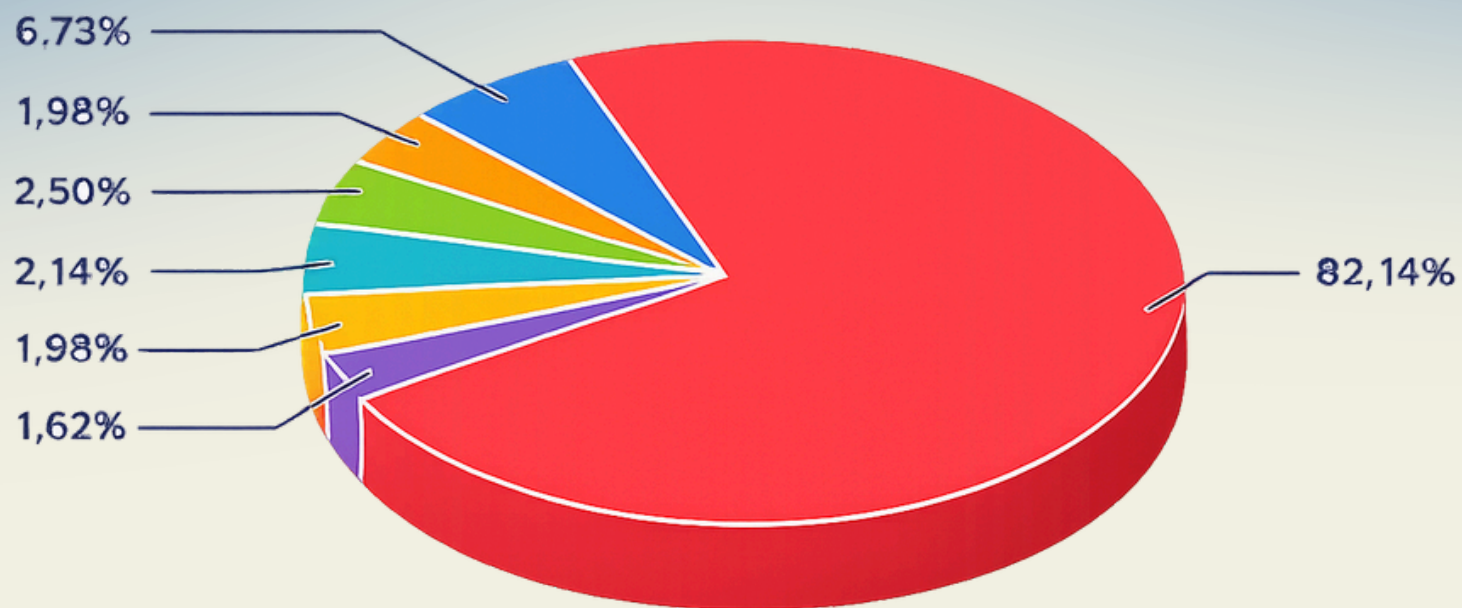
STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026



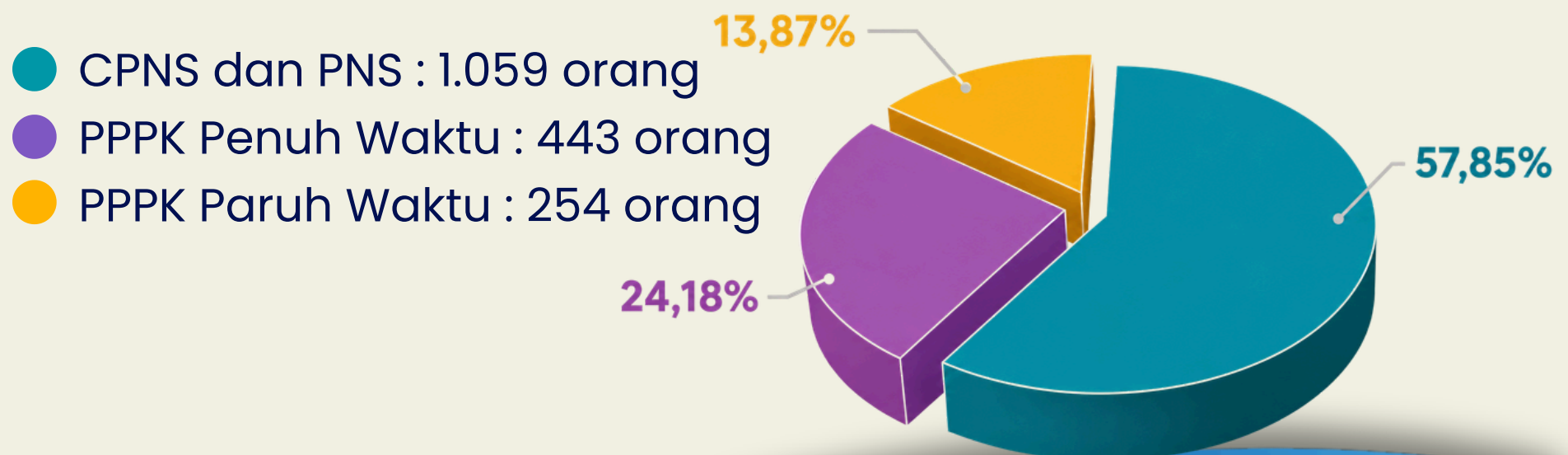


Jumlah Pegawai DJPB Berdasarkan Unit Kerja periode TW I s.d TW II Tahun 2026



● Sekretariat DJPB	: 119 orang
● Direktorat Ikan Air Tawar	: 38 orang
● Direktorat Ikan Air Payau	: 44 orang
● Direktorat Ikan Air Laut	: 41 orang
● Direktorat Rumput Laut	: 38 orang
● Direktorat Prasarana dan Sarana	: 31 orang
● Unit Pelaksana Teknis	: 1,562 orang

Jumlah Pegawai DJPB Berdasarkan Jenis ASN periode TW I s.d TW II Tahun 2026





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

DJPB mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya.



 BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU

 BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR

 BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR LAUT

 BALAI PENGUJIAN
KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN

 BALAI LAYANAN USAHA
PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA

 BALAI PRODUKSI INDUK
UDANG UNGGUL DAN
KEKERANGAN